

PERSIAPAN SERTIFIKASI ISPO PADA KOPERASI PRODUSEN FAJAR LESTARI STUDI KASUS DI DUSUN CABANG ANDUK, KECAMATAN BATU AMPAR, KABUPATEN KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT

Rudi Hartono

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Corresponden E-Mail; h.rudi@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel: (Diisi Editor)

Diterima: 10 Juni 2024

Direvisi: 20 Juni 2024

Disetujui: 05 Juli 2024

Tersedia Daring: 30 Juli 2024

Kata Kunci: Sertifikasi ISPO, Internal Control System, Koperasi, Kelapa Sawit, Pelatihan, Kabupaten Kubu Raya, Berkelanjutan

ABSTRAK

Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) telah menjadi *mandatory* atau kewajiban bagi seluruh pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia, termasuk koperasi, untuk memastikan keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, lahan kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi harus bersertifikasi ISPO paling lambat pada Oktober 2025. Penelitian ini mengkaji kesiapan Koperasi Produsen Fajar Lestari yang berlokasi di Dusun Cabang Anduk, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam mempersiapkan sertifikasi ISPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Koperasi Produsen Fajar Lestari. Fokus utama penelitian ini adalah pada pelatihan yang diikuti oleh pengurus koperasi, termasuk pelatihan sertifikasi ISPO dan pelatihan sistem kontrol internal (Internal Control System/ICS), sebagai bagian dari persiapan menuju sertifikasi.

Keywords: ISPO

Certification, Internal

Control System,

Cooperative, Palm Oil,

Training, Kubu Raya

Regency, Sustainability

ABSTRACT

ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) certification has become mandatory for all palm oil businesses in Indonesia, including cooperatives, to ensure sustainability in environmental, social, and economic aspects. Based on Presidential Decree No. 44 of 2020 and Ministry of Agriculture Regulation No. 38 of 2020, palm oil plantations managed by cooperatives must obtain ISPO certification by October 2025 at the latest. This study examines the readiness of the Fajar Lestari Producer Cooperative, located in Cabang Anduk Village, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan, in preparing for ISPO certification. This study uses a qualitative approach with a case study at the Fajar Lestari Producer Cooperative. The primary focus of this study is on the training attended by cooperative managers, including ISPO certification training and internal control system (ICS) training, as part of the preparation for certification.

1. Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama dalam struktur perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan angka kemiskinan di daerah pedesaan. Namun, besarnya kontribusi ekonomi (Supriyanto, 2012) tersebut juga disertai berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait isu keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dampak negatif seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, konflik lahan, dan ketidakadilan sosial telah menjadi sorotan global, yang kemudian mendorong adanya tuntutan terhadap produksi kelapa sawit berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia merespons melalui kebijakan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, yang mewajibkan seluruh pelaku industri perkebunan kelapa sawit, termasuk koperasi, untuk memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Dalam perspektif ekonomi syariah (Rinawati et al., 2020), keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian integral dari konsep masalah, yakni terciptanya keseimbangan antara keuntungan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus mampu menghadirkan maslahat serta meminimalisir mudharat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, implementasi ISPO tidak hanya relevan sebagai standar teknis pengelolaan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga sebagai manifestasi etika bisnis dalam Islam yang mendorong perilaku adil, transparan, dan bertanggung jawab (Siahaan et al., 2020).

Koperasi Produsen Fajar Lestari di Dusun Cabang Anduk, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat merupakan salah satu koperasi yang sedang mempersiapkan diri dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO. Proses ini melibatkan pelaksanaan serangkaian pelatihan terkait implementasi ISPO dan sistem kontrol internal (Internal Control System/ICS). Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi secara kritis sejauh mana kesiapan koperasi dalam menerapkan standar ISPO serta menganalisis dampak dari berbagai pelatihan yang telah diberikan kepada pengurus koperasi. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pendekatan ekonomi syariah, khususnya prinsip masalah dan keadilan, dapat memperkuat upaya koperasi dalam mencapai sertifikasi ISPO serta memastikan bahwa koperasi beroperasi secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research) yang difokuskan pada analisis dokumenter terhadap regulasi, laporan pelatihan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada koperasi kelapa sawit. Desain penelitian disusun untuk mengevaluasi kesiapan kelembagaan koperasi dalam memenuhi standar ISPO berdasarkan prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai ekonomi syariah. Penelitian ini diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai kontribusi pelatihan terhadap

peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dalam sistem kontrol internal. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen kebijakan, pedoman pelatihan, hasil lokakarya, dan publikasi akademik terkait. Fokus kajian ditempatkan pada konteks lokal koperasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Bahan kajian utama berasal dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, lembaga pelatihan ISPO, dan laporan internal koperasi yang telah terdokumentasi. Responden kunci yang menjadi referensi adalah pengurus koperasi yang pernah mengikuti pelatihan ISPO dan ICS, serta ahli di bidang sertifikasi perkebunan berkelanjutan yang pendapatnya dikutip dari sumber pustaka. Instrumen yang digunakan berupa panduan analisis isi (content analysis guide) yang disesuaikan dengan indikator keberlanjutan dalam kerangka ISPO dan nilai-nilai ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap pustaka primer dan sekunder yang relevan. Validitas informasi diperkuat dengan metode triangulasi sumber pustaka dan konfirmasi terhadap literatur yang telah terpublikasi secara ilmiah.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang memungkinkan pemaknaan terhadap hubungan antara pelatihan, kesiapan kelembagaan, dan prinsip keberlanjutan dalam perspektif syariah. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan peran pelatihan terhadap kesiapan sertifikasi ISPO. Penekanan diberikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan yang tercermin dalam dokumen dan hasil kajian pustaka. Interpretasi data dikaitkan dengan literatur ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian implementasi ISPO dengan nilai-nilai Islam. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan simpulan dan rekomendasi yang berbasis pada prinsip masalah dan keadilan dalam ekonomi Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Pertama, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjawab keterbatasan literatur mengenai kesiapan kelembagaan koperasi sawit rakyat dalam menghadapi sertifikasi keberlanjutan. Sebagian besar studi terdahulu lebih memfokuskan kajian pada perusahaan besar atau perkebunan skala industri, sementara peran koperasi rakyat kerap terabaikan (Pacheco et al., 2011). Penelitian ini memperlihatkan bahwa koperasi dengan manajemen terbatas tetap dapat meningkatkan kapabilitas institusionalnya melalui pelatihan ISPO dan sistem kontrol internal. Hal ini menegaskan bahwa intervensi kelembagaan yang tepat mampu meningkatkan kesiapan operasional koperasi dalam memenuhi standar keberlanjutan. Temuan ini memperluas wacana tentang pentingnya pendekatan partisipatif dan inklusif dalam pelaksanaan sertifikasi berkelanjutan di sektor sawit.

Kedua, penelitian ini merespons gap pada aspek efektivitas pelatihan sertifikasi terhadap perubahan perilaku dan kapasitas manajerial pengurus koperasi. Pelatihan yang diterapkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi bersifat transformatif dengan memfasilitasi perubahan dalam pengambilan keputusan dan penguatan tata kelola internal koperasi. Menurut (Knowles, E. Kerkman, 2007), pendekatan andragogi dalam pelatihan dewasa sangat efektif apabila dikaitkan langsung dengan kebutuhan praktis peserta,

seperti yang ditemukan dalam kasus Koperasi Fajar Lestari. Pendekatan ini mendorong proses internalisasi nilai keberlanjutan yang lebih kuat dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, pelatihan yang terstruktur dan kontekstual terbukti mampu membangun kapasitas kelembagaan yang adaptif terhadap tuntutan sertifikasi.

Ketiga, hasil penelitian ini juga mengisi kekosongan studi terkait integrasi prinsip ekonomi syariah dalam praktik keberlanjutan perkebunan. Sebagian besar pendekatan keberlanjutan masih didominasi oleh kerangka kapitalistik yang menekankan profitabilitas dan efisiensi produksi, namun mengabaikan prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Prinsip *maslahah* dan *adl* dalam ekonomi Islam menawarkan dimensi etika yang kuat dalam pengelolaan sumber daya, sebagaimana dikemukakan oleh (Chapra, 2000), bahwa sistem ekonomi Islam harus menghasilkan keadilan sosial dan keseimbangan ekologis. Kesiapan koperasi dalam mengikuti ISPO melalui pendekatan syariah memperlihatkan potensi integrasi nilai spiritual dalam sistem keberlanjutan modern. Temuan ini memperkaya diskursus keberlanjutan dengan menekankan pentingnya harmoni antara aspek spiritual, sosial, dan ekologis.

Keempat, temuan penelitian ini menjawab keterbatasan data empiris mengenai hambatan internal koperasi dalam proses sertifikasi. Sebelumnya, kendala seperti rendahnya literasi administratif, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya sistem dokumentasi sering kali diasumsikan sebagai faktor yang menghambat partisipasi koperasi dalam ISPO (Cramb & Curry, 2012). Namun, studi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan pelatihan berbasis sistem kontrol internal (ICS), kendala-kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui proses pembelajaran organisasi. Pendekatan ini sejalan dengan teori *organizational learning* yang dikemukakan oleh Argyris & Schön (1978), di mana perubahan perilaku kelembagaan dimungkinkan melalui refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, kesiapan koperasi tidak lagi dipandang semata sebagai kondisi struktural, tetapi sebagai hasil dari proses adaptasi yang dinamis.

Kelima, diskusi ini memberikan kontribusi dalam mengkaji model sertifikasi sebagai alat pemberdayaan koperasi, bukan sekadar mekanisme pemenuhan regulasi. Dalam praktiknya, sertifikasi ISPO dapat menjadi katalisator bagi penguatan tata kelola, akses pasar, dan pemberdayaan ekonomi anggota koperasi apabila diimplementasikan dengan dukungan pelatihan yang memadai dan kontekstual. Sebagaimana disampaikan oleh (Blackmore, 2007), sertifikasi harus diposisikan sebagai sarana *empowerment* dan *capacity building*, bukan sebagai beban administratif semata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi mampu memperoleh manfaat strategis dari sertifikasi ketika prosesnya difasilitasi secara partisipatif dan inklusif. Oleh karena itu, keberhasilan Koperasi Produsen Fajar Lestari dapat menjadi model replikasi bagi koperasi lain dalam memperkuat posisinya di sektor sawit berkelanjutan.

Koperasi Produsen Fajar Lestari, yang terletak di Dusun Cabang Anduk, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, telah menunjukkan kesiapan yang signifikan dalam menghadapi persyaratan sertifikasi ISPO. Untuk mempersiapkan diri memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh ISPO, koperasi ini telah mengikuti berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas internal mereka dalam

hal pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pelatihan ini sangat penting mengingat keberhasilan sertifikasi ISPO tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada pemahaman dan kesiapan pengurus koperasi serta anggota petani dalam mengimplementasikan standar ISPO di lapangan.

Kendala dalam Implementasi Pelatihan

Meskipun Koperasi Fajar Lestari telah mengikuti berbagai pelatihan untuk mempersiapkan sertifikasi ISPO, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan hasil pelatihan di lapangan:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di tingkat lapangan, baik dalam hal pengelolaan teknis pertanian maupun dalam hal pengawasan internal. Meskipun pengurus koperasi sudah dilatih, pelatihan tersebut belum sepenuhnya meresap ke dalam praktik sehari-hari petani.
- b. Kesulitan dalam Pengelolaan Lahan: Beberapa petani masih terbiasa dengan teknik pertanian tradisional dan belum terbiasa dengan praktik pertanian berkelanjutan yang diharuskan oleh ISPO. Hal ini menciptakan gap antara pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dan praktik yang dilakukan di lapangan.
- c. Kendala Finansial: Biaya untuk menerapkan beberapa perubahan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ISPO, seperti pembelian alat-alat pengelolaan lingkungan atau biaya tambahan untuk audit internal, menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi yang sebagian besar anggotanya adalah petani kecil.

Rencana Penerapan 5 Prinsip ISPO

Dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), Koperasi Produsen Fajar Lestari telah mengikuti pelatihan mengenai lima prinsip utama ISPO yang harus diterapkan untuk menjamin keberlanjutan operasional perkebunan kelapa sawit. Kelima prinsip ini, yang juga menjadi fokus dalam pelatihan Internal Control System (ICS), meliputi:

a. Kepatuhan terhadap Peraturan

Kepatuhan terhadap peraturan adalah prinsip dasar dalam sertifikasi ISPO yang menekankan pentingnya menjalankan semua aktivitas usaha kelapa sawit sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bagi Koperasi Produsen Fajar Lestari, ini berarti memastikan bahwa seluruh anggota koperasi mematuhi ketentuan yang terkait dengan izin usaha, pengelolaan lahan, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar.

- 1) Penerapan Prinsip: Koperasi harus memastikan bahwa seluruh lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti izin penggunaan lahan dan izin lingkungan. Selain itu, koperasi harus memastikan bahwa operasional perkebunan mengikuti regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan peraturan terkait lainnya.
- 2) ICS dalam Kepatuhan: Dalam sistem ICS, pengurus koperasi harus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh anggota koperasi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini juga

mencakup audit terhadap kepatuhan terhadap perizinan dan kewajiban lainnya yang terkait dengan regulasi pemerintah.

b. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik (Good Agricultural Practices - GAP)
Penerapan praktik perkebunan yang baik adalah prinsip yang mengedepankan penerapan teknik budidaya kelapa sawit yang efisien, ramah lingkungan, dan memberikan hasil yang optimal. Dalam hal ini, koperasi harus memastikan bahwa petani anggota mengadopsi praktik pertanian yang sesuai dengan standar ISPO yang mencakup efisiensi penggunaan input pertanian, pengendalian hama secara ramah lingkungan, serta pemeliharaan tanah yang berkelanjutan.

1) Penerapan Prinsip: Koperasi harus menyediakan pelatihan mengenai teknik budidaya kelapa sawit yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, teknik pengendalian hama dengan cara yang tidak merusak ekosistem, serta pengelolaan tanah dan air yang berkelanjutan. Pengurus koperasi juga perlu memberikan bimbingan kepada anggota mengenai rotasi tanaman dan pengelolaan resiko pertanian, seperti perubahan iklim.

2) ICS dalam Praktik Perkebunan: Dalam ICS, koperasi perlu memiliki sistem untuk memantau penerapan praktik pertanian yang baik oleh setiap petani anggota. Ini dapat dilakukan dengan cara melakukan audit lapangan secara rutin untuk memastikan bahwa petani telah mengikuti pedoman GAP yang telah disepakati. Selain itu, koperasi juga harus mengidentifikasi praktik-praktik yang kurang sesuai dan memberikan pembinaan atau pelatihan lanjutan.

c. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan prinsip yang menekankan perlunya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aspek operasional perkebunan kelapa sawit. Koperasi Fajar Lestari harus berkomitmen untuk mengelola perkebunan kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak lingkungan, seperti menjaga keberadaan hutan, melindungi lahan gambut, dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.

1) Penerapan Prinsip: Koperasi harus memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit yang dikelola tidak mengalihkan hutan atau merusak kawasan ekosistem yang dilindungi. Selain itu, mereka harus mematuhi aturan yang melarang pembukaan lahan di atas gambut atau daerah dengan ekosistem sensitif lainnya. Pengelolaan limbah, air, dan penggunaan energi juga harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

2) ICS dalam Pengelolaan Lingkungan: Sistem kontrol internal (ICS) harus memantau apakah kegiatan operasional koperasi, seperti pembukaan lahan dan penggunaan bahan kimia, telah dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Pengurus koperasi harus melakukan audit terhadap pengelolaan limbah, penggunaan air, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati di sekitar area perkebunan. ICS juga berperan dalam memantau dampak perubahan iklim terhadap operasional perkebunan dan memastikan bahwa tindakan mitigasi yang tepat telah diterapkan.

d. Penerapan Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang mengedepankan keterbukaan informasi terkait dengan operasional perkebunan kelapa sawit. Hal ini mencakup transparansi dalam hal

pengelolaan lahan, penggunaan bahan kimia, distribusi hasil produksi, serta pembagian keuntungan dengan petani anggota koperasi. Koperasi harus memastikan bahwa seluruh proses produksi dan pengelolaan lahan dapat diakses oleh pihak terkait, termasuk lembaga sertifikasi ISPO dan masyarakat sekitar.

- 1) Penerapan Prinsip: Koperasi perlu mengimplementasikan sistem pelaporan yang jelas dan transparan terkait semua aspek operasional, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, produksi, hingga distribusi hasil. Laporan ini harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk anggota koperasi, pihak regulator, dan konsumen.
- 2) ICS dalam Transparansi: Sistem kontrol internal juga harus dapat menjamin bahwa laporan yang disusun koperasi adalah akurat, lengkap, dan tidak disembunyikan. Setiap informasi mengenai kegiatan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan perkebunan, seperti penggunaan pestisida, rotasi tanaman, dan pengelolaan keuangan, harus dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan melalui audit internal yang dilakukan secara rutin.

e. Peningkatan Usaha Berkelanjutan

Prinsip ini mengharuskan koperasi untuk terus berusaha meningkatkan kinerja dan daya saing usaha perkebunan kelapa sawit dengan cara yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas organisasi koperasi, pemberdayaan petani, serta penerapan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan.

- 1) Penerapan Prinsip: Koperasi harus terus mengembangkan kapasitas anggota koperasi melalui pelatihan-pelatihan berkelanjutan mengenai teknologi pertanian terbaru, pengelolaan usaha, dan pemasaran yang berkelanjutan. Selain itu, koperasi juga harus mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keberlanjutan.
- 2) ICS dalam Peningkatan Usaha Berkelanjutan: ICS akan membantu koperasi untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas dari inisiatif peningkatan yang diterapkan. Misalnya, dalam hal adopsi teknologi baru, koperasi dapat memanfaatkan sistem kontrol internal untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tidak hanya meningkatkan hasil tetapi juga ramah lingkungan dan sesuai dengan standar ISPO.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, Koperasi Produsen Fajar Lestari telah memulai proses persiapan yang baik untuk memperoleh sertifikasi ISPO. Pelatihan yang telah diikuti oleh pengurus koperasi memberikan dasar yang kuat untuk implementasi sertifikasi, meskipun tantangan dalam hal pemahaman teknis dan kapasitas internal masih perlu diatasi.

Kelima prinsip ISPO adalah kepatuhan terhadap peraturan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, penerapan transparansi, dan peningkatan usaha berkelanjutan, merupakan landasan utama bagi Koperasi Produsen Fajar Lestari dalam menjalankan operasionalnya dengan cara yang berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, koperasi tidak hanya akan memenuhi standar sertifikasi ISPO, tetapi juga akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelapa sawitnya dalam jangka panjang. Penerapan Internal Control System (ICS) sangat penting dalam memastikan bahwa semua

aspek ini diterapkan secara konsisten dan diawasi dengan efektif, sehingga koperasi dapat mencapai tujuan sertifikasi ISPO dan berkontribusi pada industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan.

Rekomendasi untuk Koperasi Fajar Lestari: Melanjutkan dan memperluas pelatihan untuk petani anggota koperasi mengenai prosedur sertifikasi ISPO dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas teknis dengan melibatkan konsultan atau ahli di bidang pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Memperkuat sistem Internal Control System (ICS) untuk memastikan bahwa semua proses produksi dan operasional koperasi sesuai dengan standar ISPO. Menjalani kerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut dalam proses sertifikasi.

5. Daftar Pustaka

- Blackmore, E. (2007). *Responsible enterprise, foreign direct investment, and investment promotion: Key issues in attracting investment for sustainable development*. Londo. *International Institute for Environment and Development (IIED)*.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Cramb, R., & Curry, G. N. (2012). Oil palm and rural livelihoods in the Asia-Pacific region: An overview. *Asia Pacific Viewpoint*. *Asia Pacific Viewpoint*, 53(3), 223-239. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2012.01495.x>
- Knowles, E. Kerkman, D. (2007). An Investigation of Students Attitude and Motivation toward Online Learning. In *Sight. A Collection of Faculty Scholarship*, 2, 70-80.
- Rinawati, Ika, Basuki, & Hari. (2020). Comparative analysis of the macroeconomic thinking of classical and contemporary Muslim. *Ekonomi Syariah: Al-Iqtishod*, 2(1).
- Siahaan, J. M., Siregar, T. H., & Siahaan, E. (2020). Analisis Kebijakan Program Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *AGRISAINS: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 2(2), 139-147.
- Supriyanto, -. (2012). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.627>